

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyakit *coronavirus* 2019 atau COVID-19 dilaporkan pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. COVID-19 termasuk dalam *genus betacoronavirus*, hasil analisis menunjukkan kemiripan dengan SARS. *Coronavirus* baru 2019 (2019-nCoV) secara resmi disebut *Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala pada pasien COVID-19 biasanya berupa sesak napas, batuk kering, demam, dan kelelahan. Sejauh ini, COVID-19 telah menyebar ke seluruh negara di dunia, oleh karena itu Organisasi Kesehatan Dunia menyatakannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 [Aditia, 2021]. Pandemi COVID-19 yang semakin menyebar menjadi masa yang sulit bagi semua negara yang terdampak, tidak terkecuali Indonesia.

Sebelum adanya pandemi COVID-19 yang semakin menyebar pada awal tahun 2020 ke seluruh dunia, ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh membaik mencapai 3,5% yoy, didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perbaikan pada negara berkembang yang mengalami tekanan dan meredanya ketegangan perdagangan dunia meskipun pada tahun 2019 perang dagang dan proteksionisme Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan dinamika perekonomian tak berujung, yang membuat pertumbuhan ekonomi dunia tertekan. Di samping itu, peningkatan tensi geopolitik juga mewarnai perjalanan ekonomi dunia di akhir [Bank Indonesia, 2019]. Pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan, tetapi juga pada aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor (termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Pemerintah setiap negara yang tentu saja mencari cara bagaimana untuk menekan kenaikan kasus COVID-19 dan mencegah dampak yang lebih parah pada negaranya, tidak terkecuali Indonesia yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah seperti *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPSB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun sosial di dalam ataupun luar negeri sehingga pergerakan barang dan jasa menjadi lebih sulit. Keadaan ini berlangsung cukup lama dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah bahkan negara yang terkena dampak pandemi COVID-19 [Chaplyuk, 2021].



**Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020 [Nurhaliza, 2020]**

Pada gambar diatas pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mengalami kontraksi minus 5,32% (year on year). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan pada kuartal II-2020 sebesar Rp2.589,6 triliun. Yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memberikan efek dari masalah kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi yang menghantam umkm, korporasi, masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh dampak ekonomi lainnya sebagai peningkatan tingkat pengangguran [Coibion, 2020].

Pemerintah juga menerapkan penutupan akses keberbagai kawasan negara yang dibatasi menambah masalah bagi pelaku ekonomi. Ekonomi semakin indolen dan sulit untuk dibangun di masa pandemi. Hal ini pula berdampak di daerah perbatasan yang pada umumnya menjadi sentra perdagangan lintas batas di Indonesia melalui jalur darat (Hardi Alunaza, Agustus2022). Kalimantan Barat yang merupakan salah satu provinsi berbatasan langsung di

darat dengan Malaysia dan sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Aruk di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Entikong di Kabupaten Sanggau, Jasa di Kabupaten Sintang hingga Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Tentu saja daerah perbatasan tersebut sangat berdampak ke sektor perekonomian dengan terjadinya COVID-19. Kegiatan perekonomian di perbatasan Kalimantan Barat sebelum COVID-19 lebih sering melakukan kegiatan perdagangan seperti ekspor impor dengan Tebedu dikarenakan jarak tempuh lebih dekat dan mendapatkan harga yang jauh lebih terjangkau, lalu mengirim barang dagang ke Pontianak dengan harga yang cenderung sudah dinaikkan.

23, 6:35 AM Nilai Ekspor dan Impor 2010-2020 (US \$)

Nilai Ekspor dan Impor 2010-2020 (US\$)

Tahun	Nonmigas		Migas		Jumlah	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
2010	922 052 102	153 833 298	-	-	922 052 102	153 833 298
2011	1 867 796 771	298 443 471	-	-	1 867 796 771	298 443 471
2012	1 300 863 351	539 364 364	-	-	1 300 863 351	539 364 364
2013	1 348 607 972	498 236 319	-	-	1 348 607 972	498 236 319
2014	651 986 280	500 262 690	-	-	651 986 280	500 262 690
2015	565 967 755	627 820 186	-	-	565 967 755	627 820 186
2016	623 422 909	351 835 578	-	-	623 422 909	351 835 578
2017	827 303 497	269 069 857	-	-	827 303 497	269 069 857
2018	1 013 231 576	463 118 793	-	-	1 013 231 576	463 118 793
2019	1 168 526 647	482 098 490	-	-	1 168 526 647	482 098 490
2020	1 155 832 304	439 805 477	-	-	1 155 832 304	439 805 477

Catatan: <sup>1</sup> Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FOB)  
<sup>2</sup> Nilai impor adalah nilai Cost, Insurance and Freight (CIF)  
 [Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)]

**Gambar 2 Nilai Ekspor Impor Kalimantan Barat tahun 2010-2020 [kalbar.bps.go.id, 2021].**

Berdasarkan gambar diatas bahwa Nilai ekspor Kalimantan Barat tahun 2020 adalah sebesar US \$ 1.155.832.304, turun 1,09 persen jika dibandingkan nilai ekspor pada tahun 2019 (sebesar US \$ 1.168.526.647) dan Nilai impor Kalimantan Barat tahun 2020 adalah sebesar US \$ 439.805.477, turun 8,77 persen jika dibandingkan nilai impor pada tahun 2019 (sebesar US \$ 482.098.490). Penurunan nilai ekspor-impor di Kalimantan Barat disebabkan karena semakin meningkatnya kasus COVID-19. Sedangkan masyarakat masih bimbang apakah harus menutup toko-tokonya dan mengurangi aktivitas diluar mereka untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan pencegahannya tetapi, disatu sisi toko-toko tersebut adalah sumber mata pecaharian mereka. Maka melihat situasi ekonomi yang terus mengalami penurunan di kawasan perbatasan, mem- buat pemerintah daerah maupun pusat harus berpikir

panjang untuk menemukan solusi ekonomi yang tepat dan aman terhadap masalah ini dengan adanya kebijakan *lockdown* Indonesia-Malaysia yang memberikan dampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi dan meningkatkan ancaman keamanan di wilayah perbatasan. Secara tidak langsung penutupan jalur di perbatasan Entikong membuat isu illegal trade atau perdagangan ilegal terus meningkat [Bangun, 2014]. Yang dimana situasi ini dibutuhkannya turun tangan pemerintah untuk menangani permasalahan ini, pemerintah Kalimantan Barat yang turun tangan menangani permasalahan perdagangan ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat yang dimana memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah, dalam melakukan penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

**“Bagaimana strategi pemerintah Kalimantan Barat untuk meningkatkan perdagangan di perbatasan Kalimantan Barat pasca COVID-19?”**

## **C. Kerangka Teori dan Konsep**

Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penulis akan menganalisa penelitian ini dengan menggunakan konsep hubungan transnasional, konsep ekonomi digital, teori kebijakan publik.

### **1. Konsep Hubungan Transnasional**

Risse-Kappen berpendapat bahwa Hubungan transnasional adalah interaksi yang melintasi batas-batas nasional ketika setidaknya satu aktor yang melakukannya adalah agen non-negara, tidak beroperasi atas nama pemerintah atau organisasi antar pemerintah.

James Rosanau mendefinisikan transnasionalisme sebagai berikut: “proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat swasta yang dapat memiliki konskuensi-konskuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa.

Menurut Keohane dan Nye meningkatnya hubungan antara masyarakat, organisasi dan kelompok yang menyebabkan terjadinya hubungan transnasional adalah semakin mudahnya komunikasi, transportasi, transaksi financial dan perjalanan lintas benua [S Nye, 1971].

Maka dapat diartikan Hubungan Transnasional diartikan sebagai hubungan antara masyarakat, organisasi, kelompok maupun komunitas dari negara yang berbeda. Dalam artian adalah hubungan yang terjadi dalam hubungan transnasional bisa saja terjadi diantara orang yang tidak merepresentasikan negaranya. Hubungan Transnasional menimbulkan banyak efek. Makin banyak terciptanya organisasi berbasis transnasional dapat berdampak pada kebijakan lokal. Semakin besarnya organisasi transnasional dapat menjadi oposisi dari kebijakan pemerintah lokal.

Berdasarkan definisi dari konsep Hubungan Transnasional diatas maka disimpulkan bahwa perdagangan yang dilakukan di lintas batas negara Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia itu termasuk kedalam hubungan transnasional karena proses ekonomi dalam hal perdagangan dilakukan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh pedagang setempat yang ingin menjual barang atau jasanya ke negara tetangga dikarenakan jaraknya yang lebih dekat daripada ke kota.

## **2. Konsep Ekonomi Digital**

Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh don Tapscott ditulis dalam bukunya *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. Dalam bukunya Tapscott menyatakan bahwa ekonomi digital juga disebut ekonomi baru, hal ini dicirikan dengan adanya penggunaan informasi digital secara eksklusif. Ekonomi digital memiliki beberapa komponen yaitu ekonomi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), *electronic commerce (e-commerce)*, serta distribusi digital barang dan jasa. [Budiarta, 2020].

Ekonomi digital dapat di artikan sebagai perilaku manusia tentang cara memilih untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan hanya menggunakan *smartphone*, atau alat digital canggih lainnya yang atau diartikan sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ekonomi digital berarti manusia tidak perlu lagi melakukan kegiatan perkeekonomian seperti ke pasar untuk mendapatkan barang dan jasa, karena semuanya dapat dilakukan *online* dengan adanya yang namanya *e-commerce* cukup dengan menggunakan *smartphone* maka barang sudah bisa sampai dirumah untuk memenuhi keinginan konsumen [Permana].

*E-commerce* yang merupakan salah satu komponen ekonomi digital yang menurut Akbar & Alam (2020), *E-commerce* merupakan pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Seperti televisi, radio, dan komputer atau jaringan internet.

Transaksi bisnis yang terjadi di jaringan elektronik seperti internet. Setiap orang yang memiliki koneksi internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan *e-commerce*.

Sedangkan pengertian *e-commerce* menurut Riswandi (2019) adalah satu set dinamis ekonomi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan/jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Dari definisi para ahli di atas disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah strategi komersial baru dalam perekonomian dan perdagangan yang mengarah pada peningkatan kualitas produk dan layanan dan perbaikan tingkat layanan penyediaan sementara link persyaratan organisasi, pemasok, dan konsumen ke arah mengurangi biaya, memudahkan pembeli dalam bertransaksi dan dapat mempercepat proses pelayanan.

Dengan adanya pandemi Covid 19 perekonomian semakin terpuruk. Tetapi pertumbuhan industri *e-commerce* justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air saat ini. Sehingga bukan tidak mungkin industri *e-commerce* dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dari data Ernst & Young, bahwa peningkatan transaksi pada *e-commerce* mencapai 40% per tahunnya. Sedangkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta orang dan 71 juta di antaranya adalah pengguna smartphone [Kompas.com, 2015]. Berdasarkan data tersebut dapat diprediksi bahwa *e-commerce* dan digital ekonomi kedepan akan mengalami perkembangan yang positif. Ekonomi digital Indonesia akan menjadi besar apabila potensi UMKM bisa diangkat melalui platform digital dan perdagangan elektronik yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka lapangan kerja baru, mengembangkan inklusi keuangan dan memperluas akses modal bagi UMKM. Proses perdagangan digital telah mendorong transisi dari aktivitas ekonomi tradisional, *E-Commerce* sangat berkaitan dengan terlaksananya digital ekonomi yang efektif. Pemerintah perlu melakukan peningkatan literasi digital, pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop. Kerja sama dengan berbagai platform digital diantaranya Shoope, Tokopedia, Gojek dan berbagai marketplace lokal. Sehingga dapat melebarkan pasar bagi masyarakat di perbatasan, memperluas dan mempermudah pelanggan dalam membeli produk. Dan diharapkan dengan adanya upaya peningkatan ekonomi digital melalui *e-commerce* sehingga diharapkan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Keterpurukan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi diharapkan dapat semakin membaik. [Suwarni, 2019].

### 3. Teori Kebijakan Publik

Definisi mengenai Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone (1971;18), Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Kebijakan publik yang dimaksud oleh Thomas R. Dye (1975;1), Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*).

Menurut Amir Santoso (1993;4-5), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat para ahli yang memandang kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua adalah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Kubu yang kedua ini masih dibagi lagi menjadi dua, kategori, yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan/a n- ticipasi sebelumnya [Dr. Nuryanti Mustari, 2015].

Maka dapat diartikan teori kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah public, (2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, (3) fungsi pemerintah sebagai layanan public, (4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan definisi dari konsep kebijakan public diatas maka dengan semakin berkembangnya Ekonomi digital di Indonesia maka pemerintah mengembangkan dan mengintegrasikan peraturan yang diadakan oleh Kementerian. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) pada 24 November 2019. PP PMSE mengatur pokok-pokok transaksi *e-commerce* baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan

pembayaran. Pemerintah adalah pihak yang mendukung regulasi dan koordinasi ekonomi digital dan pelaku bisnis sebagai pihak yang menyediakan inovasi layanan dan infrastruktur pendukung bisnis ekonomi digital. Kerjasama yang baik dan supportif akan membangun iklim perekonomian digital yang stabil dan semakin tumbuh, sehingga pemanfaatan *e-commerce* oleh masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

#### **D. Hipotesis**

Dengan merujuk pada kerangka teoritik yang digunakan oleh penulis diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis bahwa strategi yang telah dilakukan pemerintah Kalimantan Barat untuk mengembalikan perdagangan dan menaikkan kembali perekonomian di perbatasan Kalimantan Barat yaitu dengan lebih mengembangkan perdagangan dalam bentuk ekonomi digital. Di antaranya, dengan melakukan peningkatan literasi digital, pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk membuat regulasi atau aturan sehingga pemanfaatan ekonomi digital oleh masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Dengan begitu keterpurukan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi diharapkan dapat semakin membaik.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Secara umum, berdasarkan pada penjabaran diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha dan pedagang untuk memulihkan kembali perdagangan di perbatasan.

#### **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan untuk mencari sebuah jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahui peneliti, begitu pula dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi mengenai fenomena atau isu yang dianggap baru serta belum pernah diteliti sebelumnya. Metode ini dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan ditinjau berdasarkan pada studi kasus dalam penelitian ini, sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka membatasi serta memfokuskan permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan dalam kurun waktu antara tahun 2019-2023 dimana dalam periode tersebut, keadaan ekonomi di perbatasan sebelum pandemi



COVID-19 dan setelah terjadinya pandemi COVID-19 lalu bagaimana strategi agar perekonomian bangkit lagi.

#### **H. Rencana Sistematika Penelitian**

Penulis membagi menjadi 4 bab yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci ke dalam sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

**BAB I:** Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tinjauan pustaka, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Bab ini menjabarkan bagaimana pengaruh COVID-19 dalam keadaan ekonomi sebelum dan sesudah di Kalimantan Barat khususnya dalam hal perdagangan.

**BAB III:** Bab ini akan menjabarkan strategi apa yang telah digunakan oleh pemerintah Kalimantan Barat untuk pemulihan perekonomian dan perdagangan.

**BAB IV:** Bab ini memuat kesimpulan yang berisikan rangkuman terhadap sub bab-sub bab yang telah dijelaskan sebelumnya.